

PERSEPSI SISWA SMA TERHADAP MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Satu Studi Penelitian di SMA Negeri 3 Semarang dan SMA Don Bosko Semarang)

Oleh :

(Seriti Puti Dewanti¹, Drs. Susilo Utomo², Drs. Tri Cahya Utama, MA³)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi pedoman nilai dan norma bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan bagian dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi mata pelajaran wajib dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Melemahnya nilai-nilai Pancasila berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Khususnya para generasi muda Indonesia yang terlihat semakin anti Pancasila. Dengan adanya kondisi yang demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa SMA terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang mengandung sila-sila Pancasila.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan ditujukan untuk mengetahui persepsi siswa SMA terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan secara terperinci. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode survai melalui pembagian kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dalam penentuan jumlah sampel pada tiap sekolah, kemudian teknik *random sampling* pada penentuan individu sebagai sampelnya atau PSU (*People Sample Unit*). Jadi populasi dipilih secara purposif berdasarkan sasaran siswa yang lebih dominan dan dianggap tepat sesuai dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA memberikan persepsi positif terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan. Siswa SMA dapat mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Antara siswa perempuan dan laki-laki keduanya tidak banyak terdapat perbedaan persepsi terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian juga antara SMA Negeri 3 Semarang dan SMA Don Bosko baik kelas X maupun kelas XI tidak terdapat perbedaan persepsi yang mencolok. Namun siswa hanya dapat menerima materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik secara teori. Dalam prakteknya kurang ada kesesuaian antara kognitif dan afektif para siswa.

Ketidaksesuaian kognitif dan afektif di kalangan siswa SMA terjadi karena faktor kemajuan jaman yang justru semakin keluar dari budaya Indonesia. Salah pergaulan dan

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro Angkatan 2009

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak menyebabkan anak mudah terbawa pergaulan yang salah. Untuk itu, perlunya sosialisasi guru dan orang tua secara efektif dalam mengawasi anak di sekolah dan di luar sekolah agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah dan semakin merusak moral bangsa Indonesia.

Kata kunci: *Persepsi, Kognitif, Pendidikan Kewarganegaraan*

ABSTRACT

Pancasila is the Indonesian national identity which becomes orientation of values and norm for all the people of Indonesia. Pancasila is a part of Civics Education lessons which is compulsory from elementary school to university. By weakening of Pancasila values gives a big affect to the behavior of Indonesian. Especially, the young generation of Indonesia looks increasingly becomes anti Pancasila. Based on those conditions, this study aimed to determine the perceptions of senior high school students to the Civics Education Material containing principles of Pancasila.

This study used descriptive quantitative approach, to describe the phenomenon that occurred and was intended to determine the perceptions of senior high school students on the Civics Education Material in detail. In collecting the data, the author used a survey method through the distribution of questionnaires. Sampling method in this research was purposive sampling to determine the number of samples in each school, then random sampling technique in the determination of the individual as a sample or PSU (People Sample Units). So the population selected purposively based on targets students who were more dominant and deemed appropriate in accordance with the theme of the study.

The results of this study showed that majority of senior high school students gave a positive perception of the Civics Education Material. Senior high school students could understand what is wrong and what is right. There were not many differences perception of the material Civics between girls and boys students. Similarly, it happened between SMA 3 Semarang and SMA Don Bosko, both class X and class XI did not show any differences in perception. However, students could only receive Citizenship Education Material well in theory. In practice there was less congruence between the students' cognitive and affective.

Inexpediency of cognitive and affective among senior high school students occurred because the progress of time factor that was even more out of the Indonesian culture. The inappropriate intercourse and lack of parental supervision of the child caused the child socially easily get carried away with the wrong intercourse. Therefore, the socialization from teachers and parents to effectively supervise children in school and out of school is needed so that children do not fall into the wrong intercourse and more damage the morale of the Indonesian nation.

Keywords: Perception, Cognitive, Civics Education

A. PENDAHULUAN

Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara bagi kita bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari sejarah masa lampau. Demikianlah halnya dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negaranya. Sejarah masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang merupakan suatu rangkaian waktu yang berlanjut dan berkesinambungan. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang terlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai Dasar dan Filsafat Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan karya besar bangsa Indonesia dan merupakan lambang Ideologi bangsa Indonesia yang setingkat dengan Ideologi besar di dunia lainnya. Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dewasa ini sungguh menyedihkan, perkembangan jati diri bangsa ini, nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan arahan dan landasan hidup, telah luntur ditelan perkembangan zaman di era globalisasi ini. Bangsa Indonesia dirasa kurang menghayati serta menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pengimplementasiannya dalam kehidupan juga sangat kurang. Bangsa Indonesia seperti kehilangan jati dirinya, pola hidupnya pun dipandang sudah tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Mereka cenderung bergaya hidup bebas, memperhatikan konsep dasar hidupnya sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup maupun perilakunya.

Jika disoroti kearah yang lebih spesifik, yang lebih disayangkan adalah para generasi muda, karena sebagai penerus bangsa seakan-akan mereka lupa akan tanggungjawabnya. Mereka lupa akan jati dirinya. Padahal ada kata mutiara *“sesungguhnya ditangan para pemudalah hidup dan mati bangsa ini”*. Terus bagaimanakah nasib bangsa Indonesia kelak, apakah kita akan berdiam diri begitu saja membiarkan bangsa ini hancur pelan-pelan digerus oleh perkembangan zaman.

Nilai Pancasila yang digali para pendiri bangsa masih sangat relevan dengan kondisi kekinian. Sikap alergi sebagian anak bangsa dengan Pancasila dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Sejak kecil anak-anak diajarkan Pancasila sebagai landasan negara yang berisi lima peri tanpa dijelaskan apa makna yang terkandung sebenarnya dari Pancasila tersebut, sehingga mereka kurang menganggap Pancasila itu ada dan penting.

Jika semua masyarakat dan terutama para penyelenggara negara benar-benar memahami Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas maka percayalah, orang-orang muda dan pelajar sekarang ini tidak akan menggampangkan dan menggagap

remeh Pancasila, serta selalu menanamkan nilai Pancasila dalam hati dan kehidupan sehari-hari mereka. Dari adanya fenomena tersebut penulis akan mencari tahu Persepsi Siswa SMA terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kehidupan pribadi sehari-hari.

B. PEMBAHASAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai. Penelitian survai yaitu, penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul di masyarakat, yang menjadi obyek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variable tersebut.

Melemahnya kekuatan Pancasila sebagai Ideologi dan pandangan hidup bangsa terjadi pada generasi muda. Kaum muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa ternyata abai dengan Pancasila. Banyak generasi muda yang lupa isi harfiah Pancasila. Apalagi mengerti Pancasila secara maknawi. Meskipun keseharian mereka diajarkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi tetap saja tidak menggugah hati mereka untuk memahami Pancasila secara mendalam. Pendidikan Pancasila terkalahkan dengan pendidikan Bahasa Inggris yang sejak beberapa tahun yang lalu menjadi pelajaran wajib dan diujikan sebagai mata pelajaran wajib syarat kelulusan siswa SMP dan SMA.

Persepsi adalah awal dari segala macam kegiatan belajar yang bisa terjadi disetiap kesempatan, disengaja atau tidak. Sebagaimana dikutip dalam Dewi S Prawiradilaga dan Evelin Siregar, mempercayai persepsi sebagai “suatu proses penerimaan informasi yang rumit, yang diterima atau diekstraksi manusia dari lingkungan. Persepsi tersebut penggunaan indera manusia”. Pada akhirnya, persepsi dapat mempengaruhi cara berpikir, bekerja, serta bersikap pada diri seseorang. Hal ini terjadi karena orang tersebut dalam mencerna informasi dari lingkungan berhasil melakukan adaptasi sikap, pemikiran, atau perilaku terhadap informasi tersebut.

Sebagian besar siswa memiliki persepsi yang positif terhadap keseluruhan materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang meliputi; 1) Ketaqwaan; 2) Toleransi; 3) Persamaan Derajat; 4) Rela Berkorban; 5) Kesederhanaan; 6) Kedisiplinan; 7) Kesadaran; 8) Persatuan dan Kesatuan; 9) Cinta Tanah Air; 10) Musyawarah; 11) Pengendalian Diri; dan 12) Keadilan.

Secara faktual mayoritas responden bisa mengetahui dan memahami makna dan isi kandungan Pancasila, hanya saja masih dalam tataran kognitif. Hal ini bisa dimaklumi bahwa metode pembelajaran yang berlangsung bersifat *spread teaching*, sehingga kepada siswa hanya dituntut untuk menghafal isi kandungan Pancasila, tanpa harus memantau perkembangan afeksi dan *overt behavior*-nya, sehingga

terdapat kemungkinan lahirnya sikap dan perilaku yang anti Pancasila sebagaimana disinyalir pada bab pendahuluan, berpotensi cukup besar. Terlebih lagi adanya gejala dekandensi moral di hampir semua sektor dan penjurur, menjadikan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan konkrit ibarat *oase* di tengah padang pasir. Gejala patologi sosial di masyarakat yang ditandai semakin maraknya penyalahgunaan dan penyelewengan kewenangan, tindak kriminalitas dan perilaku koruptif yang makin subur, pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila akan memperoleh cibiran negatif dari beberapa komponen bangsa yang sudah terkontaminasi nilai-nilai hedonis yang berkembang ibarat suatu fenomena patologi sosial.

Pancasila sebagai tata nilai kebersamaan secara ideologi, sosial, politik, budaya dan hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara normatif memiliki pandangan dan falsafah hidup yang luhur, dalam arti apabila nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara nyata dan konsekuen akan mampu memberikan energi sosio kultur yang sangat besar dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional yang saat ini terkendala dengan semakin banyaknya keinginan sebagian wilayah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lahirnya perasaan ingin memisahkan diri yang melatarbelakangi gerakan separatis (golongan yang ingin memisahkan diri dari bangsa) dewasa ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman dan penghayatan sebgaiian kecil elemen bangsa dalam membangun rasa kebersamaan, toleransi, cinta tanah air, keadilan dan semangat persamaan derajat di depan hukum, dan lain sebagainya, sebagai nilai-nilai luhur yang dikandung falsafah negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, menurut Azyumardi Azra dalam rangka membangun demokratisasi dalam masa transisi seperti dewasa ini ialah perlunya mereformasi dalam tiga bidang besar. **Pertama**, reformasi sistem (*contitutional reform*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. **Kedua**, reformasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. **Ketiga**, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Berdasarkan sinyalemen di atas, maka sekiranya perlu dikembangkan budaya politik yang lebih demokratis, yang bukan hanya diawali dari lingkungan elite pemerintahan, akan tetapi juga lebih memberdayakan peran dan fungsi partai politik dalam membangun pendidikan dan budaya politik ke arah yang lebih demokratis. Fenomena semacam ini. Dirasakan kontribusi kedua elite (baik pemerintahan maupun parpol) dirasakan kurang peduli dan masih kurang, sehingga masyarakat akar rumput (*grass root*) mengalami kenihilan dedikasi dari pemimpin yang seharusnya memberikan suri tauladan kepada mereka. Terlebih lagi praktik-praktik korupsi yang berkembang terus menjamur, yang disertai dengan lemahnya supremasi hukum, akan semakin mengikis rasa kebersamaan sosial masyarakat bawah, sehingga di mana-mana muncul tindakan anarkis, baik mengatasnamakan kelompok agama, kelompok etnis, kelompok adat dan sebagainya terhadap kelompok lain yang berbeda secara ideologis. Minimnya rasa kebersamaan dan toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia yang sangat heterogen, disebabkan karena kegagalan negara dalam menjamin rasa kebersamaan dalam perbedaan yang berbingkai

semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini, Azyumardi Azra kembali menegaskan bahwa semakin berhasil suatu rezim dalam menyediakan apa yang diinginkan rakyat, semakin mengakar kuat dalam keyakinan mereka terhadap legitimasi demokrasi. Pada saat yang sama, legitimasi juga merupakan *independent* rezim. Semakin kuat keyakinan terhadap legitimasi demokrasi dan komitmen untuk mematuhi aturan main sistem demokrasi, semakin manjur rezim dalam merumuskan kebijakan untuk merespon persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan masyarakat. Sebab para politisi merasa lebih *legowo* bekerjasama satu sama lain, maka tingkat legitimasi yang tinggi juga akan memfasilitasi kesabaran dan dukungan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Akibat dari model pendidikan kewarganegaraan yang menonjolkan kepentingan tafsir rezim ialah mata pelajaran PMP atau PPKn menjadi sangat tidak menarik, formalistik, proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena (1) materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues* yang dijabarkan dari P4; dan (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan atau kognitif, seperti hapalan butir-butir tafsir Pancasila dalam P4. Pengakuan terhadap kesan bahwa mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang cenderung bersifat hafalan atau kognitif antara lain dapat dilihat pada harapan atas penyempurnaan atau penyesuaian GBPP PPKn 1994 untuk SD, SLTP dan SMA.

Mengacu fenomena-fenomena di atas, sekiranya itulah yang menjadi kontribusi dilakukan penelitian ini, di mana semangat kebersamaan dan toleransi yang semakin memudar, khususnya di kalangan generasi muda, setidaknya perlu mendapatkan perhatian kita semuanya, baik penyelenggara negara, legislatif, yudikatif, beserta lembaga swadaya masyarakat, untuk bersinergi melakukan revisi atas langkah sosial politik yang selama ini dibangun. Membangun kebersamaan dalam sistem multipartai, seharusnya tidaklah identik dengan praktik “parlementasi” dalam sistem koalisi parlemen yang berkembang di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dewasa ini. Koalisi semu yang dibangun para elite parpol yang mengesankan politik praktis demi tercapainya tujuan politik kelompok dan pribadi elite yang berkuasa, seharusnya ditiadakan, dan dirubah menjadi koalisi sejati yang mencerminkan kebersamaan elite pemerintah dan elite parpol dengan keinginan dan aspirasi masyarakat banyak. Dalam hal ini, sesegera mungkin para elite politik memberdayakan generasi muda untuk memiliki pengetahuan dan pendidikan politik yang memadai sehingga relevan dengan semangat demokratisasi yang berkembang. Melalui sosialisasi pendidikan kewarganegaraan dapat dihasilkan kewargaan demokratis yang pada gilirannya menjadi tulang punggung penting bagi Indonesia yang benar-benar demokratis.

C. PENUTUP

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang menjadi materi ajar pendidikan di Indonesia. Dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, para siswa dan mahasiswa mendapatkan mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Masuknya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib bertujuan agar para generasi muda Indonesia selalu menjaga sikap dan melestarikan jati diri bangsa Indonesia, yang tak lain adalah Pancasila.

Sebagian besar siswa memiliki persepsi yang positif terhadap keseluruhan materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang meliputi; 1) Ketaqwaan; 2) Toleransi; 3) Persamaan Derajat; 4) Rela Berkorban; 5) Kesederhanaan; 6) Kedisiplinan; 7) Kesadaran; 8) Persatuan dan Kesatuan; 9) Cinta Tanah Air; 10) Musyawarah; 11) Pengendalian Diri; dan 12) Keadilan. Dominasi responden yang memiliki persepsi positif terhadap materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut disebabkan materi bahan ajar tersebut mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan nilai asli dan digali dari bangsa sendiri, sehingga layak untuk dilestarikan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara faktual mayoritas responden bisa mengetahui dan memahami makna dan isi kandungan Pancasila, namun masih dalam tataran kognitif. Ada kemungkinan antara kognitif dan afektif tidak sesuai, dimana secara persepsi siswa SMA bisa membedakan antara yang benar dan salah, namun secara tindakan mereka lebih mengikuti ego yang ada. Faktor pergaulan menjadi pengaruh terbesar mengapa terjadi ketidaksesuaian persepsi dan sikap.

Dari faktor pergaulan yang tidak ingin dianggap *cupu*, seringkali anak-anak remaja lebih memilih terlihat gaul dan gengsi meskipun itu salah, tidak sesuai dengan ajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Mereka menganggap materi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut sekedar teori, karena diluar sekolah mereka tidak dalam pengawasan guru. Orang tua pun tidak dapat mengawasi anak 24jam penuh.

Oleh sebab itu, Sosialisasi antara orangtua dan guru harus berjalan dengan baik dan secara berlanjut. Agar kegiatan anak baik di sekolah maupun dirumah terus terpantau dan diperhatikan, sehingga anak terus terkontrol oleh guru dan orang tua. Hal tersebut untuk meminimalisasi terjadinya perilaku menyimpang yang akan merusak moral anak bangsa dan menghindarkan anak dari pergaulan bebas serta terjauh dari perbuatan yang buruk.

Hal paling sederhana agar Pendidikan Kewarganegaraan bisa terwujud secara kognitif dan afektif adalah dengan adanya contoh nyata dari guru maupun orang tua. Sejak kecil anak diberi contoh untuk melakukan kebiasaan yang baik, kebiasaan tersebut ditanamkan sejak kecil agar terus terbawa sampai dewasa. Apabila anak terus mendapatkan contoh baik dari orang tua maka anak akan bertumbuh dewasa dengan perilaku yang baik yang diajarkan oleh orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BACAAN

Azra, Azyumardi, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.

BPS Kota Semarang 2011, *Semarang Dalam Angka*.

Bungin, Burhan, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Kencana.

Ensiklopedia Indonesia Vol VI, Jakarta, 1990.

Jalaludin, Rakhmat, 1996, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Kaelan, M.S, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995, Jakarta : Balai Pustaka.

Oktora, Roni, 2011, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*, Tesis, Universitas Diponegoro.

Prawiladilaga, Dewi, Salma dan Siregar, Evelin, 2004, *Mozaik Teknologi Pendidikan*, Jakarta : Kencana.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.

Suryanto, Agus, 1989, *Psikologi Umum Cetakan VII*, Jakarta : Aksara Baru.

Toha, Miftah, 2011, *Perilaku organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*, Jakarta : Rajawali Press.

INTERNET

Blog Pendidikan Politik dan Pancasila. Diunduh tanggal 12 November 2012. Pukul 19.00 wib

Blog Pancasila sakti, diunduh tanggal 12 November 2012. Pukul 19.00 wib.

Web Samsuri, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial UNY. Diunduh pada 20 Desember 2012 pukul 17.00 wib.

Wikipedia.co.id diunduh pada 1 Maret 2013 pukul 19.00 wib.

www.sman3smg.sch.id diunduh pada 20 Maret 2013 pukul 20.00 wib.